

TESIS

**ANALISIS PERENCANAAN PENGEMBANGAN KAWASAN TAMAN WISATA
ALAM BANTIMURUNG YANG BERKELANJUTAN (*SUSTAINABILITY TOURISM*)
(KECAMATAN SIMBANG, KABUPATEN MAROS)**

Untuk memenuhi sebagian persyaratan

Untuk mencapai derajat magister S-2

Magister Ilmu Pemerintahan



Oleh

MUH. GEMILANG PAGESSA

E062211002

MAGISTER ILMU PEMERINTAHAN

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2022

**ANALISIS PERENCANAAN PENGEMBANGAN KAWASAN TAMAN WISATA
ALAM BANTIMURUNG YANG BERKELANJUTAN (SUSTAINABILITY TOURISM)
(KECAMATAN SIMBANG, KABUPATEN MAROS)**

TESIS

Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Magister

Program Studi

Ilmu Pemerintahan

Disusun dan diajukan oleh

MUH. GEMILANG PAGESSA

Kepada

PROGRAM PASCASARJANA

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2022

LEMBAR PENGESAHAN TESIS

ANALISIS PERENCANAAN PENGEMBANGAN KAWASAN TAMAN WISATA ALAM BANTIMURUNG YANG BERKELANJUTAN (SUSTAINABILITY TOURISM) (KECAMATAN SIMBANG, KABUPATEN MAROS)

Disusun dan diajukan oleh
MUH. GEMILANG PAGESSA
E062211002

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka
Penyelesaian Studi Program Magister Program Studi Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin
pada tanggal **14 Oktober 2022**
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui

Pembimbing Utama,

Prof. Dr. Nurlinah.,M.Si.
Nip. 196309211987022001

Pembimbing Pendamping,

Dr. A. Lukman Irwan.,S.IP.,M.Si.
Nip. 197901062005011001

Ketua Program Studi
Ilmu Pemerintahan,

Prof. Dr. Nurlinah.,M.Si.
Nip. 196309211987022001

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan
Ilmu Politik Universitas Hasanuddin,



Dr. Phil. Sukri, S.IP., M.Si.
Nip. 197508182008011008

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muh. Gemilang Pagessa

Nomor Pokok Mahasiswa : E062211002

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya sendiri. Bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pemikiran dari orang lain. Apabila ditemukan atau terbukti dan dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan tesis ini hasil karya orang lain. Saya siap menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, 26 Oktober 2022

Yang Menyatakan,



Muh. Gemilang Pagessa

DAFTAR ISI

SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	iv
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRACT	xi
ABSTRAK	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	13
1.3. Tujuan Penelitian	13
1.4. Manfaat Penelitian	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	15
2.1. Pembangunan Pariwisata Berkelanjutan	15
2.2. Kawasan Wisata	27
2.3. Kriteria Kawasan Wisata	28
2.3. Tipologi Kawasan Wisata	31
2.4. Prinsip-prinsip Pengembangan Wisata	33
2.5. Collaborative Governance dalam Pembangunan Pariwisata	36
2.6. Aksesibilitas	39
2.7. Pendekatan Perencanaan Dalam Pengelolaan Kepariwisata Berkelanjutan (<i>Sustainable Tourism Development</i>)	40
2.8. Penelitian Terdahulu	44
2.9. Kerangka Pikir	46
BAB III METODE PENELITIAN	48

3.1. Pendekatan dan Jenis Penelitian	48
3.2. Lokasi Penelitian	49
3.3. Sumber Data	49
3.4. Informan	50
3.5. Teknik Pengumpulan Data	51
3.6. Fokus Penelitian	52
3.7. Analisis Data	53
BAB IV GAMBARAN UMUM DAN LOKASI PENELITIAN	56
4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	56
4.1.1. Kondisi Geografi dan Sosial Budaya Kabupaten Maros	56
4.1.2. Gambaran Umum Tempat Wisata Bantimurung	60
4.2. Hasil Penelitian Perencanaan Pengembangan Kawasan Taman Wisata Alam Bantimurung yang Berkelanjutan (Sustainability Tourism) (Kecamatan Simbang, Kabupaten Maros)	62
4.2.1. Kolaborasi OPD dalam Perencanaan pengembangan kawasan wisata TWA Bantimurung	64
4.2.1.1. Pembangunan Infrastruktur	66
4.2.1.2. Pengelolaan Kebersihan	72
4.2.2. Strategi OPD dalam perencanaan pengembangan kawasan wisata TWA Bantimurung	75
4.2.2.1. Pengembangan Sumber Daya Alam (SDA)	83
4.2.2.2. Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM)	92
BAB V PENUTUP	102
V.I. KESIMPULAN	102
V.II. SARAN	103
DAFTAR PUSTAKA	104
DOKUMENTASI	107

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Jumlah Kunjungan Wisata Bantimurung 2019-2021	10
Tabel 4.1. Fasilitas TWA Bantimurung	69
Tabel 4.2. Biaya Pembangunan Infrastruktur TWA	70
Tabel 4.3. Pengelola Kebersihan	74
Tabel 4.4. Jumlah Pengunjung Kawasan Bantimurung 2021	78
Tabel 4.5. Pengunjung TWA Bantimurung Tahun 2022	78
Tabel 4.6. Pemasukan Taman Nasional Bantimurung pada tahun 2020, 2021, dan 2022	80
Tabel 4.7. Pemasukan Taman Nasional Bantimurung pada Januari 2022-Mei 2022	82
Tabel 4.8. Proyek Pembangunan Bantimurung (2018-2021)	85

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1. Prinsip <i>Sustainable Tourism Development</i> (Bappeda, 2015c)	42
Gambar 2.2. Kerangka Pikir	47

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran ALLAH SWT yang telah memberikan kesehatan, kesempatan sehingga bisa menyelesaikan Tesis judul “Analisis Pengembangan Kawasan Pariwisata Berkelanjutan Taman Wisata Alam Bantimurung” sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister pada Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Hasanuddin. tak lupa pula penulis kirimkan shalawat salam atas junjungan Nabi **Muhammad SAW**, yang telah membawa kita dari alam yang gelap menuju alam yang terang benderang seperti sekarang kita.

Dalam Kesempatan kali ini, penulis menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada kedua orang tua, Ayahanda A.S Chaidir Syam dan Ibunda Ulfiah Nur Yusuf dengan penuh kasih sayang, serta ketulusan hati tanpa pamrih memberikan bantuan materil dan moril, selalu memberi semangat, berkat kekuatan doa luar biasa yang setiap saat beliau haturkan kepada penulis agar selalu mencapai kemudahan di segala urusan, diberi kesehatan dan perlindungan oleh Allah SWT.

Tesis ini tidak selesai tanpa bantuan dari berbagai pihak dan oleh karena itu maka melalui kesempatan ini penulis menghaturkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Jamaluddin Jompa, M.Si selaku Rektor Universitas Hasanuddin yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menempuh pendidikan Magister (S-2) di Universitas Hasanuddin.

2. Bapak Dr. Phil. Sukri, SIP, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin beserta seluruh stafnya yang telah banyak memberikan bantuan serta masukan kepada penulis
3. Ibu Prof. Dr. Hj. Nurlinah, M.Si selaku ketua Program Studi Magister ilmu pemerintahan fakultas ilmu sosial dan Ilmu politik dan seluruh staf pegawai di lingkungan Prodi Ilmu Pemerintahan atas segala saran dan masukan yang diberikan pada penulis selama perkuliahan
4. Ibu Prof. Dr. Hj. Nurlinah, M.Si dan Bapak Dr. A. Lukman Irwan.,S.IP.,M.Si selaku Pembimbing penulis selama menempuh pendidikan di Universitas Hasanuddin yang telah rela mengorbankan waktunya untuk membimbing penulis, memberi arahan, saran, dan kritikan terhadap penyusunan Tesis ini.
5. Para tim penguji Bapak Prof. Dr. Suparman Abdullah M.Si Bapak Dr. H. A. M. Rusli.,M.Si dan Bapak Dr. H. Suhardiman Syamsu, M.Si yang telah banyak memberikan masukan dan saran dalam upaya penyempurnaan tesis ini.
6. Seluruh Dosen Pasca Sarjana Magister Ilmu Pemerintahan, Bapak Prof. Dr. Juanda Nawawi.,M.Si, Ibu Prof. Dr. Nurlinah.,M.Si, Bapak Prof. Dr. Rasyid Thaha.,M.Si, Ibu Prof. Dr. Rabina Yunus.,M.Si, Bapak Dr. H. A. M. Rusli.,M.Si, Bapak Dr. H. Suhardiman Syamsu.,M.Si, Ibu Dr. Indar Arifin.,M.Si, Bapak Dr. A. Lukman Irwan.,S.IP.,M.Si, Prof. Dr. Armin.,M.Si, dan Dr. Phil Sukri.,M.Si. terima kasih atas ilmu yang telah diberikan dan semoga bermanfaat bagi penulis

7. Seluruh Pegawai/Staf Pasca Sarjana Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, yang telah memberikan ilmu, nasehat, melayani urusan administrasi dan bantuan lainnya.
8. Terima Kasih kepada Seluruh informan penulis serta semua yang terlibat dalam pengumpulan data maupun informasi yang menunjang penelitian ini
9. Kepada adik-adik Penulis yang sangat dicintai dan disayangi Tisa, Aan, Fahira, Fahmi dan Naurah terima kasih telah memberikan motivasi, dan selalu memberi semangat, dukungan dan materiil serta senantiasa menghaturkan doa dari dulu hingga saat ini yang tiada hentinya
10. Kepada Teman dan Saudara seperjuangan penulis Ulunnu Zenof Community semasa bersekolah di Pondok Pesantren IMMIM Putra Makassar
11. Kepada Kakanda seperjuangan Magister Ilmu Pemerintahan Angkatan 2021 Saudaraku Fathur Rahman Marhas, Kemal Pasha, Rivaldi, Musakkar, Jum Harianto, Arfan, Novita Sari Basmin, dan Ramdhany Utami. Terima kasih atas kerjasamanya selama ini.
12. Kepada Irma Yunita, yang selalu mendampingi dan mendoakan penulis dalam menjalani proses pendidikan ini.
13. Kepada saudara seperjuangan Gina Rahmawati sejak masih menempuh Pendidikan S1 , terima kasih atas Kerjasama dan bantuannya selama ini.
14. Kakanda dan Saudara-saudaraku Kakanda Farid Irfansyah, Chaerul Syahab, Denny Santoso, Arif Septian, Rivian Aditya, yang selalu memberikan support, arahan serta hiburan kepada penulis di setiap saat.

15. Kepada seluruh keluarga besar yang telah banyak memberikan support baik itu moril dan materil, terima kasih banyak penulis ucapkan.

16. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah memberikan dukungan dan bantuan kepada penulis.

Akhir kata, penulis mengucapkan permohonan maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Terima Kasih, Wassalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Makassar, Agustus 2022

ABSTRACT

MUH. GEMILANG PAGESSA. *Analysis of The Planning for Sustainable Development of The Bantimurung Natural Park (Sustainability Tourism) in Simbang District, Maros Regency* (Supervised by Nurlinah and A. Lukman Irwan).

Based on the results of district observations and observations made by researchers that the management and facilities available in Bantimurung are still reaping many problems, for example, the still weak tourism management, inadequate service quality, ineffective promotion and communication between stakeholders, and facilities that are still fairly inadequate. This study aims to examine and analyze the collaboration between Regional Apparatus Organizations (OPD) and strategies in planning the development of the Bantimurung tourism area. The research method used was qualitative research. The location of this research was in Maros Regency, South Sulawesi. Meanwhile, the types of data used were primary data and secondary data. Data collection techniques used were interviews, literature review, documents/archives, and documentation. The data analysis technique used was qualitative analysis. The results of the study indicate that planning for the development of the tourism sector requires collaboration and synergy between stakeholders so that its development runs according to the desired target and produces policies that do not overlap and cause conflict in the community, while collaboration in the development of the TWA area, especially infrastructure development and sanitation management in TWA still needs to be developed so that tourists do not get bored and feel comfortable, while the OPD strategy in planning the development of the Bantimurung TWA tourist area includes the development of natural resources consisting of aspects of attractions, accessibility, activities and facilities, as well as social and cultural progress optimally by looking at these various aspects such as adequate facilities, a very diverse culture and other aspects that support the development of sustainable tourism. Meanwhile, the development of human resources is carried out by the Tourism Office, namely education and training for the community. Conclusions of research on planning the development of the Bantimurung natural tourism park area of the three OPDs include: The Youth, Sports and Tourism Office, the Public Works and Spatial Planning Office, the Maros Regency Regional Planning and Development Agency, namely the development of human resources and human resources still need to be addressed and improved so that it will have an impact on the development of sustainable tourism.

Keywords : development, sustainable tourism, Maros



ABSTRAK

MUH. GEMILANG PAGESA. *Analisis Perencanaan Pengembangan Kawasan Taman Wisata Alam Bantimurung yang Berkelanjutan (Sustainability Tourism) Kecamatan Simbang Kabupaten Maros* (dibimbing oleh Nurlinah dan A. Lukman Irwan).

Pengelolaan dan fasilitas yang tersedia di Bantimurung masih menuai banyak problem misalnya: masih lemahnya pengelolaan pariwisata, kualitas pelayanan yang belum memadai, promosi dan komunikasi antarstakeholders yang belum efektif, dan fasilitas yang belum memadai. Penelitian ini bertujuan mengkaji dan menganalisis kolaborasi yang dilakukan antarorganisasi perangkat daerah (OPD) serta strategi dalam perencanaan pengembangan kawasan pariwisata Bantimurung. Penelitian dilaksanakan di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Jenis data berupa data primer dan sekunder. Pengumpulan data menggunakan wawancara, kajian pustaka, dokumen/arsip, dan dokumentasi. Data dianalisis secara kualitatif. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa dalam perencanaan pembangunan sektor pariwisata dibutuhkan kolaborasi dan sinergitas antarstakeholder sehingga pengembangannya berjalan sesuai dengan target yang diinginkan serta menghasilkan kebijakan-kebijakan yang tidak tumpah-tindih dan menimbulkan konflik di masyarakat. Adapun, kolaborasi pengembangan kawasan taman wisata alam (TWA) terutama pembangunan infrastruktur dan pengelolaan kebersihan yang ada di TWA masih perlu dikembangkan sehingga para wisatawan tidak bosan dan merasa nyaman. Adapun, strategi OPD dalam perencanaan pengembangan kawasan wisata TWA Bantimurung, antara lain pengembangan sumber daya alam yang terdiri atas aspek: atraksi, aksesibilitas, aktivitas, dan fasilitas, serta sosial dan budaya berjalan dengan optimal dengan melihat berbagai aspek tersebut, seperti fasilitas yang memadai, kebudayaan yang sangat beragam serta aspek-aspek lainnya yang mendukung pengembangan pariwisata yang berkelanjutan. Adapun, untuk pengembangan sumber daya manusia dilakukan oleh Dinas Pariwisata, yaitu pendidikan dan pelatihan bagi masyarakat. Dapat disimpulkan bahwa perencanaan pengembangan kawasan TWA Bantimurung pada ketiga OPD antara lain: Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Maros, yaitu pengembangan sumber daya dan pengembangan sumber daya manusia masih perlu dibenahi dan ditingkatkan sehingga dapat berdampak pada pengembangan pariwisata berkelanjutan.

Kata kunci: pengembangan, pariwisata berkelanjutan, Kabupaten Maros



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia merupakan Negara kepulauan dengan luas mencapai 5.193.250 km² dengan wilayah perairan yang lebih luas dibandingkan dengan daratannya. Tidak heran bahwa hal ini bisa menjadikan Indonesia sebagai salah satu Negara yang berpotensi tinggi dalam hal perairan utamanya menyangkut dengan potensi wisatanya.

Pariwisata merupakan hal yang sangat penting bagi perkembangan dan kemajuan suatu wilayah. Dari hasil pariwisata di Indonesia dapat menjadi salah satu sumber pendapatan pajak Negara Indonesia. Pariwisata suatu wilayah dapat menjadi ciri khas atau karakter suatu wilayah yang membuatnya berbeda dengan daerah lainnya.

Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki kekayaan melimpah dengan berbagai macam budaya, adat istiadat, serta agama. Potensi pariwisata Indonesia menjadi sektor ekonomi penting yang berperan besar dalam menyumbang devisa negara, menambah lapangan kerja, sekaligus memperkenalkan kebudayaan. UU Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata menjelaskan bahwa keadaan alam, flora dan fauna, sebagai karunia Tuhan Maha Esa serta peninggalan purbakala, peninggalan sejarah, serta seni dan kebudayaan yang dimiliki bangsa Indonesia merupakan

sumber daya dan modal pembangunan kepariwisataan untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat sebagaimana terkandung dalam Pancasila dan pembukaan UUD 1945.

Pembangunan ekonomi daerah merupakan suatu proses dimana pemerintah daerah dan masyarakat mengelola sumber daya alam yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antar pemerintah dengan swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan perkembangan kegiatan ekonomi (pertumbuhan ekonomi) dalam wilayah tersebut. Berbagai motivasi bagi pemerintah daerah dalam membangun kepariwisataan berkelanjutan dapat menjadi peluang bagi daerah untuk membangun perekonomiannya melalui suatu pola kebijakan. Peluang Kepariwisataan merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang dilakukan secara sistematis, terencana, terpadu, berkelanjutan, dan bertanggung jawab dengan tetap memberikan perlindungan terhadap nilai-nilai agama, budaya yang hidup dalam masyarakat, kelestarian dan mutu lingkungan hidup, serta kepentingan nasional.

Pembangunan kepariwisataan diperlukan untuk mendorong pemerataan kesempatan berusaha dan memperoleh manfaat serta mampu menghadapi tantangan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global. Dalam upaya mewujudkan pembangunan pariwisata yang baik, maka pemerintah pusat berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang

penyelenggaraan pemerintahan daerah mendelegasikan sebagian wewenangnya kepada Pemerintah Daerah. Untuk itu Pemerintah daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota memiliki kewenangan dalam hal perencanaan, pembangunan dan pengembangan potensi wisata yang ada di daerahnya masing-masing.

Meningkatnya destinasi dan investasi pariwisata, menjadikan sektor pariwisata sebagai faktor kunci dalam pendapatan baik negara maupun daerah, penciptaan lapangan kerja, pengembangan usaha dan infrastruktur. Hal ini mendorong beberapa daerah mulai melirik untuk mengembangkan kawasan pariwisata sebagai salah satu sektor unggulan untuk peningkatan ekonomi daerah.

Pengembangan kawasan pariwisata saat ini, tidak bisa lepas dari konsep pembangunan berkelanjutan yang telah menjadi agenda global setiap proses pembangunan (Bappeda, 2015c), termasuk sektor pariwisata. Konsep Pariwisata Berkelanjutan pertama kali diperkenalkan oleh “World Commission on Environment and Development (WCAD) pada tahun 1987 yang menyebutkan “*Sustainable Development is the development that meets the need of present without compromising the ability of future generation to meet their own needs*” atau didefinisikan dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sebagai Pariwisata yang memperhitungkan secara penuh dampak ekonomi, sosial dan lingkungan sekarang dan yang akan datang,

menjawab kebutuhan pengunjung, industri wisata, lingkungan dan komunitas tuan rumah (Kemenparekraf, 2012). Menurut World Tourism Organization (WTO, 1987) *“Sustainable tourism development meets the needs of present tourists And host regions while protecting and enhancing opportunity for the future. It is envisaged as leading to management of all resources in such a way that economic, social, and aesthetic needs can be fulfilled while maintaining cultural integrity, essential ecological processes, and biological diversity, and life support system”*. Inti dari konsep pariwisata berkelanjutan tersebut terdapat empat prinsip utama yaitu secara lingkungan dapat berlanjut, diterima secara sosial dan budaya, layak secara ekonomi dan memanfaatkan teknologi yang tepat.

Pengembangan kawasan pariwisata memerlukan perencanaan yang tepat dari beberapa alternatif pilihan perencanaan yang ada dan tentunya dari alternatif- alternatif tersebut perlu prioritas perencanaan. Penelitian García-Melón, Gómez- Navarro, & Acuña-Dutra (2012) tentang Evaluasi Strategi Pariwisata Berkelanjutan dengan melibatkan pemangku kepentingan pemerintahan Los Roques NP di Venezuela untuk menentukan prioritas evaluasi prosedur strategis pariwisata.

Dalam pengembangan kawasan wisata dibutuhkan peran yang lebih besar dari pemerintah terutama dalam memberikan pembinaan dan arahan yang relevan dengan model desa wisata yang dikembangkan agar

pengembangan kawasan wisata dapat berkelanjutan (P.W. Darmayanti et al, 2021). Kebijakan pariwisata memegang peranan penting dalam pengembangan kawasan pariwisata berkelanjutan dan implementasinya tergantung pada dukungan dari pemerintah pusat, pemerintah lokal, industri, dan masyarakat (Widari, 2020). Dalam membangun pariwisata yang berkelanjutan, diperlukan perubahan pola pikir dan kesadaran dari seluruh pemangku kepentingan. Hal ini menjadi kunci penting untuk memperkuat dan meletakkan konsep pembangunan pariwisata berkelanjutan. Dengan perencanaan yang baik dan manajemen yang efektif, pariwisata dapat memberikan dampak yang positif bagi ekonomi, sosial budaya, dan lingkungan.

Kementerian Pariwisata menyebutkan bahwa terdapat 4 (empat) pilar utama dalam pengembangan pariwisata. Pilar ini juga menjadi kriteria yang telah dirumuskan oleh Badan Pariwisata Berkelanjutan Dunia (Global Sustainable Tourism Council) mencakup: (1) pengelolaan destinasi pariwisata berkelanjutan (*sustainability management*), (2) pemanfaatan ekonomi untuk masyarakat lokal (*social-economy*), (3) pelestarian budaya bagi masyarakat dan pengunjung (*culture*) dan (4) pelestarian lingkungan (*environment*). Empat pilar di atas sejatinya sudah disebutkan dengan jelas dalam Undang-Undang Kepariwisata No.10 Tahun 2009 di mana kinerja pembangunan pariwisata tidak hanya diukur dan dievaluasi berdasarkan

kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi saja, tetapi juga atas kontribusinya terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, pengurangan pengangguran dan kemiskinan, pelestarian sumber daya alam/lingkungan, pengembangan budaya, perbaikan atas citra bangsa serta identitas bangsa sehingga dapat mempererat kesatuan.

Industri pariwisata seharusnya dikembangkan secara berkelanjutan yang memperhatikan kelestarian lingkungan. Pariwisata berkelanjutan (*sustainable tourism*) adalah pariwisata yang berkembang sangat pesat, termasuk pertambahan arus kapasitas akomodasi, populasi lokal dan lingkungan, dimana perkembangan pariwisata dan investasi-investasi baru dalam sektor pariwisata seharusnya tidak membawa dampak buruk dan dapat menyatu dengan lingkungan, jika kita memaksimalkan dampak yang positif dan meminimalkan dampak negatif (I Nyoman Sukma Arida, 2017). Pembangunan pariwisata yang berkelanjutan sangat penting untuk diterapkan karena menurut paradigma pembangunan berkelanjutan didasari perjalanan pelaksanaan pembangunan yang semakin tidak terkontrol dalam sebuah negara.

Aspek berkelanjutan juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata. Bahkan, dalam undang-undang tersebut dinyatakan bahwa pembangunan kepariwisataan harus diselenggarakan berdasarkan asas berkelanjutan. Pembangunan

kepariwisataan bertujuan melestarikan alam, lingkungan, dan sumber daya yang diwujudkan diwujudkan melalui pelaksanaan rencana pembangunan kepariwisataan dengan memperhatikan keanekaragaman, keunikan, dan kekhasan budaya dan alam, serta kebutuhan manusia untuk berwisata.

Pembangunan kepariwisataan yang diatur dalam undang-undang tentang kepariwisataan meliputi industri pariwisata, destinasi pariwisata, pemasaran, dan kelembagaan kepariwisataan. Pembangunan kepariwisataan berdasarkan rencana induk kepariwisataan yang terdiri atas rencana induk pembangunan kepariwisataan nasional, rencana induk pembangunan kepariwisataan provinsi, dan rencana induk pembangunan kepariwisataan kabupaten/kota diharapkan menekankan asas berkelanjutan yang berbasis lingkungan untuk meminimalisasikan dampak negatif perkembangan industri pariwisata khususnya terhadap lingkungan.

Pengembangan pariwisata yang berkelanjutan akan memberikan jaminan terhadap kelestarian dan keindahan lingkungan, terutama yang berkaitan dengan jenis biota dan ekosistem utama. Ada empat keuntungan yang dapat diperoleh dengan semakin berkembangnya kepariwisataan suatu daerah. Pertama, akan mempertahankan kelestarian dan keindahan lingkungan, kedua, akan memberikan sumbangan yang cukup berarti bagi pendapatan masyarakat. Ketiga, mampu mengurangi jumlah pengangguran

karena daya serap tenaga kerjanya yang cukup besar dan merata. Keempat, mendorong timbulnya wirausaha yang bergerak di industri pariwisata, baik langsung maupun tidak langsung.

Prinsip-prinsip pembangunan pariwisata yang berkelanjutan merupakan persyaratan dan berperan sebagai pedoman dasar yang berfokus pada etika pariwisata berkelanjutan dan pariwisata bertanggung jawab yang perlu ditaati oleh setiap destinasi maupun organisasi Pariwisata lainnya. Dalam hal ini masyarakat dipersyaratkan untuk mampu mengendalikan, mengontrol pembangunan pariwisata melalui keterlibatannya secara langsung dalam penyusunan visi pembangunan pariwisata; menemu kenali sumber daya untuk dipelihara dan dilestarikan; Menetapkan sasaran dan strategi baik untuk pembangunan maupun management pariwisata; dan berperan serta dalam pelaksanaan/implementasi dari strategi yang telah ditetapkan, demikian juga dalam pengurusan operasional sarana Infrastruktur, pelayanan dan fasilitas pariwisata.

Sulawesi Selatan merupakan salah satu daerah tujuan wisata, ini dilihat dengan meningkatnya kunjungan wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara ke Sulawesi Selatan, maka perkembangan di bidang pariwisata pun mengalami kemajuan yang pesat. Hal ini dapat dilihat dari pesatnya pembangunan prasarana dan sarana wisata seperti pembangunan hotel, bertambahnya travel agen, dijadikannya Bandar Udara Sultan Hasanuddin

sebagai bandar udara internasional dan makin dikembangkannya tempat-tempat wisata lainnya. Dalam upaya untuk melaksanakan program pembangunan pariwisata yang sedang dilaksanakan oleh pemerintah, pemerintah Sulawesi Selatan berusaha meningkatkan citra positif dalam pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya atau potensi pariwisata yang dimilikinya. Selain upaya pembangunan obyek dan daya tarik wisata dan kegiatan promosi, diperlukan pula fasilitas pelayanan wisatawan diantaranya sarana transportasi, akomodasi yang nyaman, keamanan serta hal lain yang dianggap perlu untuk menunjang program pengembangan pariwisata.

Salah satu Daerah Tujuan Wisata (DTW) Sulawesi Selatan adalah Kabupaten Maros yang banyak memiliki potensi alam objek wisata alam yang menarik salah satunya ialah Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung. Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung sebagai bagian dari Kabupaten Maros yang memiliki daya tarik untuk dikembangkan sebagai daerah tujuan wisata baik untuk pasar wisata nusantara maupun mancanegara. Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung yang mempunyai potensi sebagai objek wisata yang didukung oleh keberadaannya sebagai suatu kawasan yang memiliki potensi sangat besar.

Keunikan dari daya tarik wisata air terjun Bantimurung Kabupaten Maros ini tidak terlepas dari nilai-nilai kebudayaan dan sejarah masa lalu. Tidak heran jika di kawasan air terjun ini mampu menarik perhatian wisatawan

untuk berkunjung ke kawasan tersebut. Sekaligus untuk menunjang devisa atau pemasukan daerah dan meningkatkan ekonomi masyarakat disekitarnya. Lokasi wisata ini tersedia beberapa tempat peristirahatan bungalow dan wisma bagi para pengunjung yang ingin lebih lama menikmati keindahan alamnya. Di sepanjang jalan masuk ke lokasi terdapat sejumlah pedagang souvenir kupu-kupu berbentuk gantungan kunci ataupun hiasan dinding dengan harga berkisar antara Rp. 5.000 hingga Rp. 25.000. Pengelolaan kawasan wisata air terjun Bantimurung Kabupaten Maros harus memperhatikan kaidah dan prinsip pembangunan berkelanjutan agar tujuan yang diinginkan dapat tercapai secara maksimal. Adapun jumlah pengunjung yang berkunjung ke Bantimurung dalam kurung waktu 3 tahun terakhir antara lain sebagai berikut:

Tabel 1.1. Jumlah Kunjungan Wisata Bantimurung 2019-2021

No.	Data Pengunjung	Jumlah Pengunjung	Tahun
1	Nasional	383.830	2019
	M mancanegara	527	
2	Nasional	198.010	2020
	M mancanegara	62	
3	Nasional	175.203	2021
	M mancanegara	15	

Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 2022

Dari tabel 1 diatas dapat dilihat bahwa jumlah kunjungan dalam 3 tahun terakhir wisata alam Bantimurung menurun drastis dengan adanya pandemi Covid-19 ini, akan tetapi dilihat dari jumlah pengunjung masih di dominasi oleh pengunjung nasional dibanding pengunjung mancanegara yang jumlah hanya kisaran 527 orang paling banyak berkunjung ditempat ini.

Berdasarkan hasil observasi dan pengamatan langsung yang dilakukan oleh peneliti bahwa pengelolaan serta fasilitas yang tersedia di Bantimurung ini masih menuai banyak problem misalnya masih lemahnya pengelolaan pariwisata, kualitas pelayanan yang belum memadai, promosi dan komunikasi yang belum efektif antar stakeholders, serta fasilitas yang masih terbilang belum memadai. Hal tersebut juga disampaikan salah satu masyarakat setempat yang bahwa:

“Sarana dan prasarana di Bantimurung ini masih perlu dikembangkan supaya daya tarik pariwisata semakin meningkat pengunjungnya sehingga berdampak pada perekonomian masyarakat disini untuk lebih sejahtera, selain itu akses menuju kesini agak terbilang jauh oleh karena itu pemerintah kabupaten perlu memikirkan agar nantinya akses menuju ke tempat ini mudah dijangkau oleh para pengunjung”

Salah satu hal yang menarik untuk diperhatikan oleh pemerintah kabupaten dalam pengembangan pariwisata bantimurung adalah adalah masih banyaknya sampah yang berserakan dimana-mana sehingga terlihat kotor di setiap *spot-spot* wisata, selain itu fasilitas pun masih perlu dikembangkan misalkan penambahan hotel, perbaikan bangunan yang rusak misalnya toilet dan lainnya. Oleh karena itu Dinas Pemuda, Olahraga dan

Pariwisata Kab. Maros, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Maros serta badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Maros di Taman Wisata Bantimurung perlu berkolaborasi untuk memperbaiki kekurangan di tempat wisata ini.

Berdasarkan uraian diatas maka dianggap penting dikonstruksikan implementasi prinsip-prinsip pembangunan pariwisata berkelanjutan dan strategi pengembangan pariwisata berkelanjutan (*sustainable tourism development*) yang telah dan akan dilaksanakan oleh perangkat daerah terkait yakni Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kab. Maros, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Maros serta badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Maros di Taman Wisata Bantimurung. Penelitian ini mengkaji mengenai makna konsep pengembangan pariwisata berkelanjutan (*sustainable tourism development*) dan strategi pengembangan pariwisata berkelanjutan (*sustainable tourism development*) pada fasilitas penunjang pariwisata di Taman Wisata Bantimurung.

Berdasarkan penjelasan dari latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk meneliti tentang **“Analisis Pengembangan Kawasan Taman Wisata Alam Bantimurung yang Berkelanjutan (sustainability tourism) di Kecamatan Simbang, Kabupaten Maros”**.

1.2. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalahnya adalah:

1. Bagaimana Kolaborasi antar OPD dalam perencanaan pengembangan kawasan pariwisata berkelanjutan di Bantimurung?
2. Apa strategi OPD dalam perencanaan pengembangan kawasan pariwisata Bantimurung?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan gambaran dari rumusan masalah diatas, maka peneliti merumuskan tujuan penelitian antara lain:

1. Untuk menganalisis Kolaborasi yang dilakukan antar OPD dalam perencanaan pengembangan kawasan pariwisata berkelanjutan di Bantimurung
2. Untuk menganalisis strategi yang dilakukan oleh OPD dalam perencanaan pengembangan kawasan pariwisata Bantimurung

1.4. Manfaat Penelitian

1. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah daerah dalam perencanaan pengembangan kawasan pariwisata yang berkelanjutan untuk menjadi bahan evaluasi dalam pengembangan kawasan pariwisata Bantimurung.
2. Sedangkan secara akademis penelitian ini diharapkan bisa menambah referensi untuk penelitian-penelitian selanjutnya.

3. Sebagai bahan referensi bagi peneliti lainnya dan diharapkan dapat berguna dan bermanfaat sebagai sumber kepustakaan dalam pengembangan Ilmu Pemerintahan di masa yang akan datang

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan pustaka merupakan bagian yang sangat penting dari sebuah usulan penelitian tesis. Bagian ini akan memberikan landasan teori dan konsep yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan. Adapun tinjauan pustaka dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

2.1. Pembangunan Pariwisata Berkelanjutan

Pembangunan berkelanjutan adalah sebuah konsep yang bertujuan untuk menciptakan keseimbangan antara dimensi pembangunan yaitu ekonomi, sosial dan lingkungan hidup. Dimana dalam proses pembangunan tersebut memiliki prinsip memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi yang akan datang. Unsur-unsur pendukung yaitu sumber daya manusia, sumber daya alam, dan teknologi harus bersinergi agar tidak terjadi ketimpangan antar dimensinya yaitu pertumbuhan ekonomi, inklusi sosial serta perlindungan terhadap lingkungan hidup. Oleh karena itu, pembangunan berkelanjutan berarti merupakan pembangunan yang dapat berlangsung secara terus menerus dan konsisten dengan menjaga kualitas hidup masyarakat dengan tidak merusak lingkungan dan mempertimbangkan cadangan sumberdaya yang ada untuk kebutuhan masa depan.

Salah satu dimensi pembangunan nasional adalah pembangunan pariwisata. Di Indonesia, sektor pariwisata saat ini merupakan salah satu pembangunan sektor unggulan dalam rencana kerja Pemerintah jangka pendek maupun jangka menengah bahkan rencana kerja Pemerintah jangka panjang.

Pariwisata adalah salah satu sektor ekonomi terbesar dan tercepat di dunia, dan memiliki peran yang cukup besar dalam memberikan pembangunan berkelanjutan di banyak negara. Pada saat yang sama pariwisata harus dikelola dengan baik sehingga bermanfaat bagi masyarakat lokal dan lingkungan alam dan budaya.

Pariwisata juga merupakan kegiatan utama yang mampu mendukung sektor ekonomi yang bertanggung jawab dan memberikan kontribusi 9% untuk PDB global. Sampai saat ini terjadi pertumbuhan tingkat kedatangan pengunjung yang signifikan bahkan jauh melebihi rata-rata pertumbuhan dunia yang diperkirakan akan terus berlanjut, terutama di negara-negara berkembang. Sektor pariwisata juga memberikan kontribusi sebesar 29% dalam ekspor jasa di seluruh dunia. Bagi banyak negara berkembang kontribusi ini sangat signifikan, dan kadang-kadang sebagai sumber utama pendapatan devisa. Studi akademis menegaskan bahwa kontribusi sektor pariwisata terhadap pertumbuhan ekonomi dan banyak badan-badan internasional, konvensi dan komunikasi telah secara resmi mengakui pentingnya sektor ini sebagai penggerak pembangunan berkelanjutan.

Berdasarkan hasil analisis terhadap tren pengembangan pariwisata di seluruh dunia, setidaknya ada tiga kesimpulan utama dapat ditarik sehubungan dengan pariwisata dan potensinya dalam pengentasan kemiskinan:

1. Pariwisata adalah salah satu sektor ekonomi yang paling dinamis di banyak negara, yang dikembangkan tetapi juga mengembangkan, dengan berbagai efeknya dari hulu dan hilir pada kegiatan ekonomi lainnya, berkat rantai pasokan yang sangat besar dan beragam.
2. Gerakan wisata di negara berkembang dan negara kurang berkembang tumbuh lebih cepat daripada di negara maju, dengan perhitungan hampir 50% persen dari total kedatangan wisatawan internasional. Hal ini disebabkan karena negara berkembang memiliki aset nilai yang sangat besar untuk sektor pariwisata, seperti budaya, seni, lanskap, satwa liar dan iklim, dan posisi yang baik untuk mengembangkan pariwisata yang merupakan sektor kunci dalam berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi.
3. Pariwisata di banyak negara berkembang dan negara kurang berkembang merupakan salah satu sumber utama, bahkan di beberapa negara sebagai sumber utama dalam penerimaan devisa dan, merupakan pembangunan ekonomi paling layak dan berkelanjutan yang berdampak positif pada pengurangan tingkat kemiskinan.

Sementara pariwisata merupakan kekuatan utama dalam pembangunan, namun pariwisata juga memiliki sejumlah aspek negatif, seperti:

1. Pariwisata merupakan salah satu kontributor yang signifikan atas perkembangan perubahan iklim yang saat ini mencapai sekitar 5% dari emisi CO global, terutama yang dihasilkan oleh transportasi tetapi juga disebabkan oleh pengoperasian fasilitas pariwisata seperti akomodasi.
2. Polusi tanah dan air yang diakibatkan oleh buruknya limbah padat dan cair dari aktivitas bisnis pariwisata dan dari kegiatan wisatawan merupakan masalah di beberapa daerah.
3. Bisnis akomodasi dan masyarakat lokal akan bersaing sebagai pengguna utama sumber daya yang tidak terbarukan dan berharga seperti air dan tanah sehingga akan mengganggu pasokan sumber daya tersebut.
4. Pengembangan kawasan pariwisata yang buruk dan kegiatan yang tidak pantas bisa sangat merusak keanekaragaman hayati di daerah sensitif. dampak negatif ke situs warisan budaya dapat terjadi jika dikelola oleh manajemen yang buruk.
5. Pariwisata dapat memiliki dampak negatif pada masyarakat lokal, melalui pembatasan akses atas tanah dan sumber daya dan mengarah ke peningkatan kejahatan, eksploitasi seksual dan ancaman terhadap tradisi dan nilai-nilai sosial dan budaya.

6. Kondisi kerja yang buruk kadang-kadang ditemukan di sektor ini.
7. Kinerja ekonomi sektor ini rentan terhadap pengaruh sumber pasar, seperti kondisi ekonomi, peristiwa alam dan masalah keamanan, meskipun pemulihan mungkin cepat saat keadaan sudah membaik.
8. Sehingga semua aspek negatif di atas menggarisbawahi kebutuhan pariwisata sebaiknya dilakukan dengan sangat hati-hati, direncanakan dan dikelola di negara berkembang. Hal ini mendorong pemerintah untuk menetapkan dan melaksanakan kebijakan yang jelas pada kontrol dan manajemen dari sektor ini, dalam hubungannya dengan semua pemangku kepentingan pariwisata. Persyaratan mendasar dari sektor pariwisata semestinya mampu merangkul prinsip-prinsip pariwisata berkelanjutan dan fokus pada pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan

Konsep pariwisata berkelanjutan di Indonesia sudah dituangkan dalam dokumen kebijakan dan hukum, yakni dalam Undang-undang kepariwisataan yang lama, nomor 9 tahun 1990, yang kemudian diperbaharui menjadi Undang-undang nomor 10 Tahun 2009. Undang-undang nomor 10 Tahun 2009, pasal 4 mengungkapkan; kinerja pembangunan pariwisata seharusnya tidak hanya dievaluasi berdasarkan kontribusinya pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga atas kontribusinya terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, pengurangan

pengangguran dan kemiskinan, pelestarian sumberdaya alam dan lingkungan, pengembangan budaya.

Visi Pembangunan Nasional Jangka Panjang Indonesia, Visi Pembangunan Pariwisata Nasional dan Visi Kementerian Pariwisata mengandung kesamaan prospek, yang merujuk kepada pentingnya pembangunan berkelanjutan dan khususnya tentang kesejahteraan rakyat, kesatuan dan identitas nasional kualitas hidup, nilai tambah, pelestarian sumberdaya budaya dan seni, dan kerjasama internasional sebagai sasaran kunci yang akan dicapai, dipelihara dan diperluas (Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI, 2012). Seperti yang diuraikan dalam Program Kerja Pemerintah Tahun 2017, Rencana Program Pemerintah Jangka Menengah Nasional (RPJMN 2015-2019) dan Rencana Program Kerja Pemerintah Jangka Panjang Nasional (RPJMN 2005–2025 terdapat korelasi antara pembangunan nasional dengan implementasi pariwisata berkelanjutan yaitu tercapainya arah dan sasaran pembangunan sosial budaya, pembangunan ekonomi, serta pembangunan sumber daya alam dan lingkungan hidup.

Lahan fungsi kawasan-kawasan konservasi sebagai berikut: cagar alam suaka margasatwa hutan wisata (terdiri dari taman wisata dan taman buru). Dalam peraturan perundang-undangan ini juga mengatur tentang konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistem yang bersifat nasional dan terkait cukup banyak dengan ketentuan-ketentuan pokok pengelolaan

lingkungan hidup yang digunakan sebagai dasar hukum, namun belum sepenuhnya dapat mengakomodasi berbagai kepentingan berbagai pemangku.

UU No. 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya membagi kewasannya sebagai berikut:

- a. Kawasan suaka alam terdiri dari cagar alam dan margasatwa
- b. kawasan pelestarian alam terdiri taman nasional, taman wisata, dan hutan raya.

Dalam undang-undang ini pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati diatur dalam Pasal 5, dimana dalam pemanfaatan dilakukan dengan tetap menjaga kelestarian fungsi kawasan diatur dalam Pasal 27.

Demikian juga UU No. 41/1999, menganggap hutan sebagai kesatuan ekosistem berupa sumber daya alam hayati dan lingkungannya. Sumberdaya tidak dilihat sebagai sekumpulan komoditas. Penyelenggaraan kehutanan didasarkan asas manfaat lestari, kerakyataan, keadilan, kebersamaan, keterbukaan dan keterpaduan. Dengan azas itu, alokasi kawasan hutan sesuai dengan fungsinya yaitu hutan lindung, produksi dan konservasi.

Kepastian hukum sangat penting untuk menentukan siapa yang punya akses, hak memiliki dan memanfaatkan sumber daya alam tersebut dilindungi oleh negara dan diakui oleh pemangku kepentingan lainnya, sehingga setiap orang dapat mengelola pesisir secara terencana dan

memiliki rasa kepemilikan yang menjadi nilai dasar pelestarian tersebut. Kepastian hukum yang dapat memberikan rasa keadilan dan keamanan pada masyarakat dalam melaksanakan kegiatan pemanfaatan sumberdaya pesisir tanpa intervensi oleh pemangku penguasa atau pengguna sumberdaya dari daerah lain. Bagi dunia usaha, kepastian hukum memberikan jaminan keamanan investasinya dalam jangka panjang serta mengurangi resiko berusaha. Sedangkan bagi Pemda, kepastian hukum dapat menjamin konsistensi dan kebijakan pelaksanaan otonomi daerah secara penuh dan bertanggung jawab.

Akan tetapi usaha-usaha konservasi menjadi rumit dan kompleks dengan adanya kepentingan yang dimiliki oleh sebagian pemangku. Para penganut konservasi murni akan memilih untuk melakukan pembangunan total pada kehidupan alam, akan tetapi dalam kenyataannya ekonomi dan politik memaksa bahwa pendekatan ini akan sulit untuk dilaksanakan. Pada kenyataannya tiga nilai yang terkandung pada konservasi, yaitu melindungi, memanfaatkan dan mempelajari belum berjalan dengan seimbang. Nilai pemanfaatan jauh lebih diterapkan daripada dua nilai yang lainnya. Inilah yang menjadi akar permasalahan dalam usaha-usaha konservasi dimana saja, terutama di negara-negara berkembang (Yohanes Sulistyadi, Fauziah Eddyono, n.d.)

Pembangunan adalah dimana proses pembaruan yang terus menerus dan berkesinambungan dari keadaan tertentu ke keadaan yang lebih

baik. Pembangunan terbagi menjadi dua yakni pembangunan fisik dan pembangunan non fisik. Menurut Kuncoro, (2010:20) pembangunan fisik merupakan pembangunan yang dapat dilihat secara nyata dan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat seperti pembangunan infrastruktur, gedung, serta fasilitas lainnya, sementara (Wresniwiro, 2012) pembangunan non fisik merupakan pembangunan yang dihasilkan serta dorongan dari masyarakat setempat dalam waktu yang lama, misalnya peningkatan perekonomian masyarakat dan lainnya.

Cronin dalam sharpley (2000:17), mengatakan pada dasarnya konsep pembangunan pariwisata yang berkelanjutan (*Sustainable Tourism Development*) berfokus pada dua hal yakni adanya suatu kegiatan perekonomian serta pariwisata melahirkan suatu kebijakan tentang pembangunan yang berkelanjutan yang sangat luas di masyarakat. Hasil dari pariwisata berkelanjutan seharusnya digunakan selaras dengan lingkungan, masyarakat, serta budaya lokal setempat, sehingga berdampak secara nyata bagi masyarakat untuk jangka panjang bukan malah jadi beban dari pembangunan pariwisata. Oleh karena itu setiap kebijakan tentang pembangunan pariwisata berkelanjutan harus menekankan agar terarah kepada penggunaan sumber daya manusia serta sumber daya alam untuk jangka waktu yang lama (Sharpley, 2000:10)

Perumusan strategi dilakukan dalam rangka melengkapi dan menyempurnakan konsep perencanaan strategis sebelum-sebelumnya, dari sejumlah strategi yang disusun sebelumnya perlu diperhatikan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan rencana strategis. Pengembangan *Sustainable Tourism Development* dalam hal ini di Pengembangan Kawasan Taman Wisata Alam Bantimurung (*Sustainability Tourism*) Kecamatan Simbang, Kabupaten Maros, asa serta nilai keberlanjutan perlu diperhatikan untuk jangka waktu yang panjang. Fokus utama dari pariwisata yakni adanya kegiatan perekonomian masyarakat, pariwisata melahirkan suatu kebijakan tentang pembangunan yang berkelanjutan yang sangat luas di masyarakat, pemanfaatan sumber daya alam serta kualitas sumber daya manusia harus diperhatikan, seperti yang disampaikan oleh Sharpley (2000:10) mengatakan bahwa kebijakan pembangunan seharusnya mengarah pada sumber daya manusia dalam jangka waktu yang panjang dan memanfaatkan sumber daya alam

1. Strategi Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM)

Sumber daya manusia pariwisata yang menguasai, menggunakan serta mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam pengelolaan pariwisata hal tersebut sangat diperlukan disebabkan karena globalisasi saat ini sangat berkembang dengan dengan pesat. Pengembangan SDM merupakan suatu upaya dalam peningkatan kualitas manusia meliputi pengembangan kegiatan di

bidang pendidikan, pelatihan dan kegiatan-kegiatan lainnya. Penjelasan tersebut berfokus dalam pemerataan pembangunan untuk meningkatkan kualitas manusia serta pemanfaatan kemampuan (Sein, 2009). Dalam meningkatkan kualitas hidup tersebut menurut Mulyadi (2003:2) perlu didukung kebijakan antara lain:

- a. Pembangunan pendidikan akan fokus pada arah pembangunan ekonomi masa depan. Pada dasarnya dalam peningkatan mutu pendidikan itu sendiri tidak hanya menitikberatkan pada pendidikan formal, tetapi salah satu upaya yang dilakukan disamping pendidikan formal adalah pendidikan informal, yaitu dalam bentuk pelatihan atau kursus.
- b. Perhatian telah diberikan pada pembangunan kesehatan dengan membangun budaya hidup sehat dan memperluas cakupan pelayanan medis, terutama bagi masyarakat di daerah terpencil. Tentunya dalam hal ini pembangunan kesehatan tidak terlepas dari lingkungan yang bersih. Dalam budaya hidup sehat, tentunya masyarakat tidak terbatas pada kesehatan pribadi melainkan juga menjaga kebersihan lingkungan adalah budaya hidup sehat.
- c. Peningkatan kualitas masyarakat prasejahtera dilakukan dengan memberikan keterampilan praktis, menumbuhkan sikap produktif, dan menumbuhkan kemandirian dan semangat kemandirian untuk keluar dari kemiskinan. Pembukaan sektor pariwisata di daerah

tertentu memastikan masyarakat memiliki kesempatan untuk mengembangkan dunia usaha dan wirausaha.

- d. Mengurangi pertumbuhan penduduk dengan meningkatkan pelaksanaan gerakan KB dan meningkatkan keseimbangan antara kepadatan dan distribusi penduduk, termasuk migrasi dan industri di pedesaan.

2. Strategi pengembangan Sumber Daya Alam (SDA)

Sustainable Tourism Development semua aspek sumber daya alam merupakan bagian terpenting yang harus diperhatikan oleh semua pemangku kepentingan. Pengelolaan, perawatan dan konservasi sumber daya alam di sektor pariwisata merupakan bagian penting yang perlu disiapkan dan direncanakan untuk kebijakan. Berdasarkan Keputusan Nomor 18 Tahun 1994 tentang Pemanfaatan Wisata Alam Pada Kawasan Pemanfaatan Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam, asas-asas pengembangan wisata alam dan standar pengembangan dalam pembangunan tunduk pada wisata alam dan memperhatikan hal-hal berikut ini:

- a. Pengembangan Wisata Alam berlangsung di sebagian kecil kawasan blok yang digunakan dan juga memperhatikan aspek keberlanjutan.
- b. Pengembangan wisata alam tidak boleh secara mendasar mengubah kredibilitas bentang alam dan habitat

- c. Pengembangan sarana dan prasarana pariwisata harus didasarkan pada identitas daerah.

2.2. Kawasan Wisata

Wisata atau Obyek Wisata adalah segala sesuatu yang ada di daerah tujuan wisata yang merupakan daya tarik agar orang-orang mau datang berkunjung ke tempat tersebut, sementara pengertian kawasan wisata antara lain:

- a. Suatu bentuk integrasi antara atraksi, akomodasi dan fasilitas pendukung yang disajikan dalam suatu struktur kehidupan masyarakat yang menyatu dengan tata cara dan tradisi yang berlaku.
- b. Suatu wilayah kawasan wisata yang memiliki keunikan dan daya tarik yang khas (baik berupa daya tarik/ keunikan fisik lingkungan alam kawasan wisata maupun kehidupan sosial budaya kemasyarakatan), yang dikelola dan dikemas secara alami dan menarik dengan pengembangan fasilitas pendukung wisata dalam suatu tata lingkungan yang harmonis dan pengelolaan yang baik dan terencana. Sehingga daya tarik kawasan tersebut mampu menggerakkan kunjungan wisatawan ke kawasan wisata tersebut, serta menumbuhkan aktivitas ekonomi pariwisata yang meningkatkan kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat setempat.

Kawasan wisata dalam konteks wisata tersebut dapat disebut sebagai aset kepariwisataan yang berbasis pada potensi kawasan

dengan segala keunikan dan daya tariknya yang dapat diberdayakan dan dikembangkan sebagai produk wisata untuk menarik kunjungan wisatawan ke lokasi kawasan tersebut. (Bappeda, 2015c).

2.3. Kriteria Kawasan Wisata

Suatu Kawasan dapat dikembangkan sebagai kawasan wisata apabila memiliki kriteria-kriteria dan faktor-faktor pendukung sebagai berikut:

a. **Potensi Produk/Obyek dan Daya Tarik Wisata yang Unik dan Khas**

Memiliki potensi produk/ daya tarik yang unik dan khas yang mampu dikembangkan sebagai daya tarik kunjungan wisatawan (sumber daya wisata alam, budaya). Potensi obyek dan daya tarik wisata merupakan modal dasar bagi pengembangan suatu kawasan menjadi kawasan wisata. Potensi kawasan wisata tersebut dapat berupa:

1. Potensi fisik lingkungan alam (persawahan, perbukitan, bentang alam, tata lingkungan perkampungan yang unik dan khas, arsitektur bangunan yang unik dan khas, dsbnya).
2. Potensi kehidupan sosial budaya masyarakat (pola kehidupan keseharian masyarakat yang unik dan khas, adat istiadat dan tradisi budaya, seni kerajinan dan kesenian tradisional, dsbnya).

b. **Tingkat Penerimaan dan Komitmen yang Kuat dari Masyarakat Setempat**

Tingkat penerimaan dan komitmen masyarakat terhadap kegiatan kepariwisataan; yaitu adanya sikap keterbukaan dan penerimaan masyarakat setempat terhadap kegiatan pariwisata sebagai bentuk kegiatan yang akan menciptakan interaksi antara masyarakat lokal (sebagai tuan rumah/ host) dengan wisatawan (sebagai tamu/ guest) untuk dapat saling berinteraksi, menghargai dan memberikan manfaat yang saling menguntungkan, khususnya bagi masyarakat lokal adalah bagi penghargaan dan pelestarian budaya setempat dan manfaat ekonomi kesejahteraan masyarakat lokal. Sedangkan bagi wisatawan adalah pengkayaan wawasan melalui pengenalan budaya lokal. Untuk itu perlu adanya semangat dan motivasi yang kuat dari masyarakat dalam menjaga karakter yang khas dari lingkungan fisik alam kawasan dan kehidupan budaya yang hidup dan tumbuh dalam masyarakat setempat. Hal tersebut juga merupakan faktor yang sangat mendasar, karena komitmen atau motivasi tersebut sesungguhnya yang akan menjamin kelangsungan daya tarik dan kelestarian sumber daya wisata yang dimiliki kawasan tersebut. Karena apabila hal tersebut tidak terjaga maka modal dasar yang menjadi daya tarik dan magnet wisatawan untuk berkunjung ke kawasan tersebut akan hilang, dan kegiatan pariwisata tidak dapat berlangsung kembali. Oleh karena itu kelembagaan yang mendukung pengembangan dan

pengelolaan kawasan wisata menjadi faktor pendukung keberhasilan pengembangan kawasan wisata.

c. Potensi Sumber Daya Manusia Lokal yang Mendukung

Memiliki dukungan ketersediaan sumber daya manusia (SDM) lokal yang cukup dan memadai untuk mendukung pengelolaan kawasan wisata. Hal tersebut sangat penting dan mendasar karena pengembangan kawasan wisata dimaksudkan untuk memberdayakan potensi SDM setempat sehingga mampu meningkatkan kapasitas dan produktivitasnya secara ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat kawasan melalui bidang-bidang yang dimilikinya.

d. Peluang Akses terhadap Pasar Wisatawan

Potensi dasar yang dimiliki oleh suatu kawasan untuk menjadi kawasan wisata selanjutnya perlu didukung dengan faktor peluang akses terhadap akses pasar. Faktor ini memegang peran kunci, karena suatu kawasan yang telah memiliki kesiapan untuk dikembangkan sebagai kawasan wisata tidak ada artinya manakala tidak memiliki akses untuk berinteraksi dengan pasar/ wisatawan. Oleh karena itu kesiapan kawasan wisata harus diimbangi dengan kemampuan untuk membangun jejaring pasar dengan para pelaku industri pariwisata, dengan berbagai bentuk kerjasama dan pengembangan media promosi sehingga potensi kawasan tersebut

muncul dalam peta produk dan pemaketan wisata di daerah, regional, nasional maupun internasional. Sedemikian sehingga dapat dijaring peluang kunjungan wisatawan ke kawasan tersebut.

e. Ketersediaan Area/Ruang untuk Pengembangan Fasilitas Pendukung Wisata

Memiliki alokasi ruang/ area untuk pengembangan fasilitas pendukung wisata kawasan, seperti: akomodasi/ homestay, area pelayanan umum, area kesenian dan lain sebagainya. Hal tersebut sangat penting dan mendasar karena aktivitas wisata kawasan akan dapat berjalan baik dan menarik apabila didukung dengan ketersediaan fasilitas penunjang yang memungkinkan wisatawan dapat tinggal, berinteraksi langsung dengan masyarakat lokal, dan belajar mengenai kebudayaan setempat, kearifan lokal dan lain sebagainya. (Bappeda, 2015c)

2.3. Tipologi Kawasan Wisata

Tipologi kawasan wisata didasarkan atas karakteristik sumber daya dan keunikan yang dimilikinya dapat dikelompokkan dalam 4 (empat) kategori, yaitu:

1. Kawasan wisata berbasis keunikan sumber daya budaya lokal (adat tradisi kehidupan masyarakat, artefak budaya, dsb) sebagai daya tarik wisata utama, yaitu Kawasan dengan keunikan berbagai unsur adat tradisi dan kekhasan kehidupan keseharian masyarakat yang melekat sebagai

bentuk budaya masyarakat Kawasan, baik terkait dengan aktivitas mata pencaharian, religi maupun bentuk aktivitas lainnya.

2. Kawasan wisata berbasis keunikan sumber daya alam sebagai daya tarik utama (pegunungan, agro/ perkebunan dan pertanian, dsbnya) yaitu wilayah kawasan dengan keunikan lokasi yang berada di daerah pegunungan, lembah, pantai, sungai, danau dan berbagai bentuk bentang alam yang unik lainnya, sehingga kawasan tersebut memiliki potensi keindahan view dan lansekap untuk menarik kunjungan wisatawan.
3. Kawasan wisata berbasis perpaduan keunikan sumber daya budaya dan alam sebagai daya tarik utama, yaitu wilayah kawasan yang memiliki keunikan daya tarik yang merupakan perpaduan yang kuat antara keunikan sumber daya wisata budaya (adat tradisi dan pola kehidupan masyarakat) dan sumber daya wisata alam (keindahan bentang alam/ lansekap).
4. Kawasan wisata berbasis keunikan aktivitas ekonomi kreatif (industri kerajinan, dan sebagainya) sebagai daya tarik wisata utama, yaitu wilayah kawasan yang memiliki keunikan dan daya tarik sebagai tujuan wisata melalui keunikan aktivitas ekonomi kreatif yang tumbuh dan berkembang dari kegiatan industri rumah tangga masyarakat lokal, baik berupa kerajinan, maupun aktivitas kesenian yang khas. (Bappeda, 2015c).

2.4. Prinsip-prinsip Pengembangan Wisata

Pengembangan kawasan wisata sebagai suatu aset kepariwisataan dan aset ekonomi untuk menumbuhkan ekonomi pariwisata di daerah, khususnya di wilayah kawasan, disamping perlu didukung dengan pemenuhan atas sejumlah kriteria dasar diatas, juga harus dikembangkan dengan menjaga dan memenuhi prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Tidak bertentangan dengan adat istiadat atau budaya masyarakat kawasan setempat. Pengembangan suatu kawasan menjadi kawasan wisata harus memperhatikan sebagai aspek yang berkaitan dengan kehidupan sosial, budaya dan mata pencaharian Kawasan tersebut. Suatu kawasan dalam pengembangannya atraksi wisata harus disesuaikan dengan adat, budaya ataupun tata cara yang berlaku di kawasan tersebut. wisatawan yang berkunjung ke kawasan tersebut harus mengikuti tata cara dan adat istiadat yang berlaku di kawasan tersebut.
2. Pembangunan fisik ditujukan untuk meningkatkan kualitas lingkungan kawasan. Pengembangan pariwisata di suatu kawasan pada hakekatnya tidak merubah apa yang sudah ada di kawasan tersebut, tetapi lebih kepada upaya merubah apa yang ada di kawasan dan kemudian mengemasnya sedemikian rupa sehingga menarik untuk dijadikan atraksi wisata. Pengembangan fisik seperti penambahan

sarana jalan setapak, penyediaan MCK, penyediaan sarana dan prasarana air bersih dan sanitasi lebih dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas lingkungan yang ada sehingga Kawasan tersebut dapat dikunjungi dan dinikmati oleh wisatawan.

3. Memperhatikan unsur kelokalan dan keaslian. Arsitektur bangunan, pola lansekap serta material yang digunakan dalam pembangunan haruslah menonjolkan ciri khas kawasan tersebut sehingga dapat mencerminkan kelokalan dan keaslian wilayah setempat. Bahan-bahan/ material yang digunakan untuk bangunan rumah, interior, peralatan makan/minum dan fasilitas lainnya hendaknya memberikan nuansa yang alami dan menggambarkan unsur kelokalan dan keaslian. Bahan-bahan seperti kayu, gerabah, bambu dan sirap serta material alami lainnya hendaknya mendominasi suasana, sehingga menyatu dengan lingkungan alami sekitarnya. Penggunaan bahan-bahan tersebut selain meningkatkan daya tarik kawasan yang bersangkutan juga sesuai dengan konsep dasar lingkungan.
4. Memberdayakan masyarakat kawasan wisata. Unsur penting dalam pengembangan Kawasan wisata adalah keterlibatan masyarakat kawasan dalam setiap aspek wisata yang ada di Kawasan tersebut. Pengembangan wisata sebagai pengejawantahan dari konsep pariwisata inti rakyat mengandung arti bahwa masyarakat kawasan memperoleh manfaat sebesar- besarnya dalam pengembangan

pariwisata. Masyarakat terlibat langsung dalam kegiatan pariwisata dalam bentuk pemberian jasa dan pelayanan yang hasilnya dapat meningkatkan pendapatan masyarakat di luar aktivitas mereka sehari-hari. Beberapa bentuk keterlibatan masyarakat tersebut adalah penyediaan fasilitas akomodasi berupa rumah rumah penduduk (*homestay*), penyediaan kebutuhan konsumsi wisatawan, pemandu wisata, penyediaan transportasi lokal seperti andong/dokar, kuda, pertunjukan kesenian, dan lain sebagainya.

5. Memperhatikan daya dukung dan daya tampung serta berwawasan lingkungan pembangunan suatu kawasan menjadi kawasan wisata harus memperhatikan kapasitas kawasan tersebut, baik kapasitas fisik maupun kesiapan masyarakat. Prinsip-prinsip pariwisata yang berkelanjutan (*sustainable tourism*) harus mendasari pengembangan kawasan wisata. Pengembangan yang melampaui daya dukung akan menimbulkan dampak yang besar tidak hanya pada lingkungan alam tetapi juga pada kehidupan sosial budaya masyarakat yang pada akhirnya akan mengurangi daya tarik kawasan tersebut.

Pendekatan lain dalam memandang prinsip-prinsip pengembangan kawasan wisata adalah:

- a. Pengembangan fasilitas-fasilitas wisata dalam skala kecil beserta pelayanan di dalam atau dekat dengan kawasan.

- b. Fasilitas-fasilitas dan pelayanan tersebut dimiliki dan dikerjakan oleh penduduk kawasan, salah satu bisa bekerja sama atau individu yang memiliki.
- c. Pengembangan kawasan wisata didasarkan pada salah satu “sifat” budaya tradisional yang lekat pada suatu kawasan atau “sifat” atraksi yang dekat dengan alam dengan pengembangan Kawasan sebagai pusat pelayanan bagi wisatawan yang mengunjungi kedua atraksi tersebut.

Pengembangan kawasan wisata harus direncanakan secara hati-hati agar dampak yang timbul dapat dikontrol. Berdasar dari penelitian dan studi-studi dari UNDP/WTO dan beberapa konsultan Indonesia, dicapai dua pendekatan dalam menyusun kerangka kerja/konsep kerja dari pengembangan sebuah kawasan menjadi kawasan wisata.

2.5. Collaborative Governance dalam Pembangunan Pariwisata

Kolaborasi diambil dari kata *co* dan *labor*, yang diartikan sebagai penggabungan tenaga untuk mencapai tujuan bersama, kata kolaborasi seringkali digunakan untuk pekerjaan yang bersifat lintas batas, lintas sektor, lintas hubungan (O’Leary, 2010). Kolaborasi merujuk pada proses pengambilan keputusan bersama (Stoker, 2004) sehingga kolaborasi diartikan sebagai kerjasama antar organisasi untuk mendapatkan keuntungan bersama (Kim, 2010). Tata kelola

Pemerintahan-*Governance* yang menggunakan prinsip kolaborasi. *Collaborative governance* pada akhir-akhir ini muncul sebagai konsep alternatif dalam penyelenggaraan pemerintahan di tingkat lokal ketika permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah daerah semakin kompleks (O'Leary, 2008), sementara birokrasi sebagai aktor tunggal pelaksana semakin terseok dan terbelenggu dengan segala keterbatasan dan patologi yang menghinggapinya. Kolaborasi dalam *governance* diartikan sebagai proses fasilitasi dan pelaksanaan terhadap pengaturan peran multi organisasi terhadap masalah yang tidak mampu dipecahkan oleh organisasi tunggal.

Definisi *collaborative governance* dijelaskan sebagai *A governing arrangement where one or more public agencies directly engage non- state stakeholders in a collective decision-making process that is formal, consensus oriented, and deliberative and that aims to make or implement public policy or manage public programs or assets* (Ansell and Gash, 2007). Sebuah pengaturan dimana satu atau beberapa lembaga publik dan lembaga non-publik terlibat dalam proses pengambilan keputusan kolektif yang bersifat formal, berlandaskan pada konsensus, dan menggunakan pertimbangan dengan tujuan untuk membuat atau mengimplementasikan kebijakan publik atau mengelola program-program atau aset publik. Lebih lanjut

dijelaskan bahwa kolaborasi dapat memberi kepuasan kepada setiap pihak yang terlibat atau *A principle characteristic of collaborative processes is that they lead to outcomes satisfactory to all parties involved* (Gray, 2004). Kolaboratif governance akan berhasil apabila terjadi dialog murni-*authentic* dialog yang memungkinkan semua pihak memiliki suara, berdiskusi atas kepentingan bersama, memiliki pemikiran yang terbuka, menyadari posisi masing-masing dan memiliki keinginan untuk mencari solusi yang berguna bagi semua pihak (Innes and Booher ,2003:38).

Collaborative governance menjadi alternatif pemerintahan sebab dianggap efektif dan efisien dalam penyelenggaraan pemerintahan. Setidaknya ada enam alasan utama mengapa *collaborative governance* dikatakan sebagai pilihan terbaik dalam penyelenggaraan pemerintah (O'Leary 2010), yaitu:

1. Tantangan masalah publik makin kompleks dan sulit ditangani secara monopoli oleh satu organisasi pemerintah, membutuhkan multi pendekatan
2. Beberapa organisasi pemerintah telah melakukan mekanisme outsourcing untuk meningkatkan kapasitas organisasinya, mekanisme ini tentunya membutuhkan tambahan anggaran yang membebani anggaran pemerintah. Mekanisme outsourcing pada

dasarnya menggunakan prinsip kolaborasi antara organisasi pemerintah dan organisasi non-pemerintah atas dasar kontrak kerja.

3. Terjadi perubahan signifikan mengenai hubungan antar pemerintah pada tingkat yang berbeda, antara pemerintah pusat-daerah yang memungkinkan terciptanya mekanisme kerja atas dasar prinsip kerjasama/*cooperation*, kolaborasi dan pertukaran informasi.
4. Meningkatkan efektivitas program/kegiatan yang dibiayai oleh pemerintah dapat mendorong pegawai pemerintah untuk melakukan identifikasi cara-cara baru untuk menyediakan pelayanan terbaik bagi masyarakat.
5. Perkembangan teknologi yang mempermudah pertukaran informasi untuk pengambilan keputusan yang integratif melalui prinsip interoperabilitas.
6. Masyarakat mencari arena baru untuk mengambil dan berperan atau masuk dalam tata kelola pemerintahan/*governance*, yang memungkinkan terciptanya kolaborasi dalam pemecahan masalah serta pengambilan keputusan

2.6. Aksesibilitas

Semua jenis sarana prasarana, transportasi yang mendukung pergerakan wisatawan dari wilayah asal wisatawan ke destinasi

pariwisata, contohnya adalah: jalan raya, jalan tol, jembatan, transportasi darat, laut, udara, penyeberangan, dan sebagainya.

1. Jasa / Pelaku Pariwisata

Unsur pelaksana/ jasa terkait yang berfungsi sebagai operator pelayanan kebutuhan wisatawan dalam melakukan perjalanan wisata, contohnya adalah: tour operator, pemandu wisata, pengelola usaha transportasi, dan sebagainya.

2. Durasi Waktu & Aktivitas

Rentang waktu yang diperlukan dan aktivitas yang dilakukan wisatawan dalam melakukan kunjungan perjalanan wisata untuk menyusun program kegiatan. (Bappeda, 2015c)

2.7. Pendekatan Perencanaan Dalam Pengelolaan Kepariwisata Berkelanjutan (*Sustainable Tourism Development*)

Pembangunan berkelanjutan (sustainable development) telah menjadi agenda global dalam setiap proses pembangunan. Oleh karenanya, seluruh pemangku kepentingan termasuk pemerintah dalam berbagai sektor pembangunan harus menerapkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan baik dalam setiap kebijakan maupun rencana pembangunan yang akan dilaksanakan, tentu saja termasuk di dalamnya pembangunan sektor kepariwisataan. Konsep pembangunan berkelanjutan dimunculkan pertama kali oleh World Commission on Environment and Development Report pada tahun

1987 dengan mendefinisikan *sustainable development* sebagai “*meeting the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs*”. Berdasarkan definisi tersebut, World Tourism Organization (WTO), telah menerapkannya pada sektor- sektor kepariwisataan dengan mendefinisikan Sustainable Tourism Development menjadi:

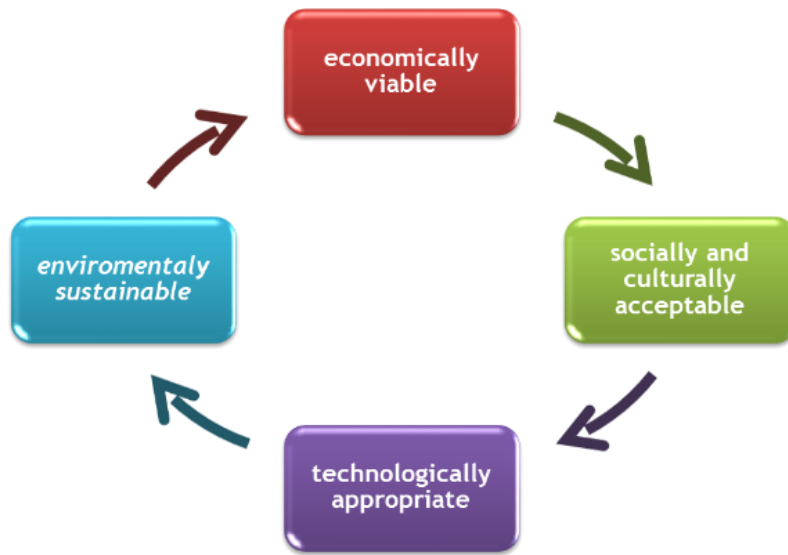
“Sustainable tourism development meets the needs of present tourists And host regions while protecting and enhancing opportunity for the future. It is envisaged as leading to management of all resources in such a way that economic, social, and aesthetic needs can be fulfilled while maintaining cultural integrity, essential ecological processes, and biological diversity, and life support system.”
(Bappeda, 2015c).

Definisi tersebut diadopsi oleh banyak negara di seluruh belahan dunia dalam berbagai macam variasi. Konsep pembangunan pariwisata berkelanjutan pada intinya menekankan pada 4 (empat) prinsip, sebagai berikut:

- a. Secara lingkungan dapat berlanjut/ lestari (*environmentally sustainable*)
- b. Diterima secara sosial & budaya (*socially and culturally acceptable*)

- c. Layak secara ekonomi (*economically viable*)
- d. Memanfaatkan teknologi yang tepat (*technologically appropriate*)

Gambar 2.1. Prinsip *Sustainable Tourism Development* (Bappeda, 2015c)



Sumber: Bappeda

Prinsip *environmentally sustainable* menekankan bahwa proses pembangunan kepariwisataan harus tanggap dan memperhatikan upaya-upaya untuk menjaga kelestarian lingkungan (baik alam, buatan maupun sosial budaya), dan mampu mencegah dampak negatif yang dapat menurunkan kualitas lingkungan dan mengganggu keseimbangan ekologi.

Prinsip *socially and culturally acceptable* yang menekankan bahwa proses pembangunan dapat diterima secara sosial dan budaya oleh masyarakat setempat. Oleh karenanya, upaya-upaya pembangunan yang dilaksanakan harus memperhatikan nilai-nilai sosial-budaya dan nilai-nilai kearifan lokal yang dijunjung tinggi oleh masyarakat, dan bahwa dampak

pembangunan tidak boleh merusak tatanan dan nilai-nilai sosial-budaya sebagai jati diri masyarakat.

Prinsip *economically viable* yang menekankan bahwa proses pembangunan harus layak secara ekonomi dan menguntungkan. Oleh karenanya, pembangunan harus dilaksanakan secara efisien agar dapat memberikan manfaat ekonomi yang signifikan baik bagi pembangunan wilayah maupun peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal.

Prinsip *technologically appropriate* yang menekankan bahwa proses pembangunan secara teknis dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien, dengan memanfaatkan sebesar-besar sumber daya lokal, dan dapat diadopsi masyarakat setempat secara mudah untuk proses pengelolaan yang berorientasi jangka panjang.

Tujuan pembangunan pariwisata berkelanjutan yang didasarkan atas prinsip-prinsip tersebut, akan bermuara pada 5 (lima) sasaran sebagai berikut (Bappeda, 2015c):

- a. Terbangunnya pemahaman dan kesadaran yang semakin tinggi bahwa pariwisata dapat berkontribusi secara signifikan bagi pelestarian lingkungan dan pembangunan ekonomi
- b. Meningkatnya keseimbangan dalam pembangunan
- c. Meningkatnya kualitas hidup bagi masyarakat setempat
- d. Meningkatnya kualitas pengalaman bagi pengunjung dan wisatawan

- e. Meningkatnya dan menjaga kelestarian dan kualitas lingkungan bagi generasi yang akan datang

2.8. Penelitian Terdahulu

Budi (2016) melakukan penelitian pengembangan model strategi pengembangan kawasan pariwisata yang berdaya saing dan berkelanjutan di DKI Jakarta. Pendekatan dilakukan dengan Metode penelitian campuran sekuensial kuantitatif dan kualitatif digunakan untuk penelitian ini. Metode penelitian kuantitatif Structural Equation Modeling (SEM) digunakan untuk menganalisis sisi permintaan berdasarkan sampel yang telah diambil dengan teknik purposive sampling pengunjung kawasan-kawasan pariwisata di DKI Jakarta. Kemudian, metode kualitatif Analytic Network Process (ANP) digunakan untuk menganalisis data sisi permintaan dan penawaran yang dikumpulkan dengan wawancara mendalam kepada pakar pariwisata.

García-Melón et al., (2012) melakukan penelitian tentang Evaluasi Strategi Pariwisata Berkelanjutan yang dipromosikan oleh pemangku kepentingan terkait Taman Nasional (*National Park*) adalah perhatian utama untuk manajer *National Park*. Untuk membantu mereka dalam evaluasi prosedur strategis mereka, dengan menggunakan metodologi berdasarkan *Analytic Network Process* dan prosedur penghakiman tipe-Delphi. Itu pendekatan bertujuan melibatkan pemangku kepentingan dalam proses pembangunan partisipatif dan konsensus. Metodologi ini diterapkan pada Los

Roques NP di Venezuela. Permasalahannya adalah tiga strategi pariwisata lestari yang ditetapkan oleh pemangku kepentingan: resort hemat energi, kegiatan rekreasi ramah lingkungan dan ekologis sistem transportasi. Perwakilan dari delapan pemangku kepentingan berpartisipasi dalam metodologi tersebut 13 kriteria keberlanjutan dipilih. Di Iran Heidari Majid et al (2014) meneliti tentang perkembangan industri pariwisata di Pulau Kish di negara Iran dengan menggunakan metode analisis SWOT dan metode ANP. Analisis ini dilakukan dengan fokus pada kelompok pariwisata khususnya para ahli kebijakan dan perencanaan keputusan manajemen strategis di industri pariwisata Iran.

Penelitian Morteza et al (2016) tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Terpadu di Iran untuk pembangunan sosial dan ekonomi yang berkelanjutan di wilayah pesisir. Tujuan dari penelitian ini adalah menentukan lokasi wisata yang optimal di antara berbagai alternatif pariwisata berdasarkan strategi ICZM. Dengan mengembangkan model evaluasi berdasarkan proses jaringan analitik (ANP) dan teknik untuk kinerja pesanan oleh kesamaan dengan solusi ideal (TOPSIS), untuk membantu investor dalam industri pariwisata, pemilihan lokasi pariwisata yang optimal di Pesisir Terpadu Zone Management dalam lingkungan fuzzy, dimana ketidakjelasan dan subjektivitas diparameterkan dengan bilangan fuzzy segitiga. ANP digunakan untuk menganalisis struktur masalah pemilihan lokasi pariwisata dan menentukan bobot kriteria, sedangkan metode Fuzzy TOPSIS digunakan

untuk mendapatkan prioritas akhir. Untuk kenyamanan dan ketepatan dalam menghitung bobot relatif kriteria, perangkat lunak Super Decisions digunakan.

Posisi penelitian ini nantinya untuk menganalisis perencanaan pengembangan kawasan pariwisata Bantimurung yang berkelanjutan (*sustainability tourism*) ini dilakukan dengan melihat konsep implementasi prinsip pariwisata berkelanjutan yang meliputi partisipasi, keikutsertaan para pelaku (*stakeholder*), kepemilikan lokal, penggunaan sumber daya secara berkelanjutan, mewadahi tujuan-tujuan masyarakat, perhatian terhadap daya dukung, dan pelatihan. Sedangkan strategi pengembangan pariwisata akan dilihat dari Teori Hadinoto (1996) yang menguraikan bahwa ada beberapa hal yang menentukan dalam strategi pengembangan suatu obyek wisata diantaranya adalah: atraksi wisata, promosi dan pemasaran, pasar wisata (masyarakat pengirim wisata), transportasi, dan masyarakat.

2.9. Kerangka Pikir

Berdasarkan tinjauan pustaka diatas, maka dapat dirumuskan kerangka pemikiran penelitian ini dibawah ini.

Gambar 2.2 Kerangka Pikir

